

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PT ANGKASA PURA II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**AGUNG SETIAWAN
NIM : 17622200**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE PADA PT ANGKASA PURA II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

NAMA : AGUNG SETIAWAN
NIM : 17622200

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT ANGKASA PURA II
TANJUNGPINANG**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

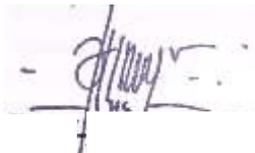
Oleh :

NAMA : AGUNG SETIAWAN

NIM : 17622200

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Hendy Satria, S. E., M. Ak
NIDN : 1015069101 / Lektor



Pembimbing Kedua,

Budi Zulfachri, S.S.i., M.Si
NIDN. 1028067301/ Asisten Ahli

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S. E., M. Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

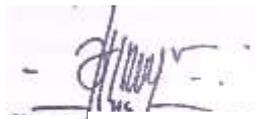
**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT ANGKASA PURA II
TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NAMA : AGUNG SETIAWAN
NIM : 17622200

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian
Pada Tanggal Lima Belas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



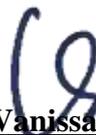
Hendy Satria, S. E., M. Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Sekretaris,



Fauzi, S.E., M Ak
NIDN. 8928410021 / Asisten Ahli

Anggota,



Vanessa Meifari, S.E., M. Ak
NIDN. 1026059301 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 15 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charli Marlinda, S.E., M. Ak, CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT, kita memuji-Nya, dan meminta pertolongan, pengampunan serta petunjuk kepadanya-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada pemberi petunjuk baginya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga doa, shalawat tercurah pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat serta siapa saja yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Amin

Aku persembahkan tugas akhir ini dan rasa

terimakasih aku ucapkan untuk :

Mama dan papa

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada hingga, saya persembahkan karya kecil ini untuk papa dan mama yang telah memberikan kasih dan sayang, dukungan serta cinta kasih yang diberikan yang tak terhingga yang yang tidak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dan persembahan ini. Semoga ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bangga

HALAMAN MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Surah Al Mujadalah ayat 11

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Mahamulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

QS. Al' Alaq 96: 1-5

Semua kesulitan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini akan terbayar ketika melihat orangtua kita bahagia TERSENYUM bangga saat kita memakai toga 😊

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang**”. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan STRATA-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Program Studi Akuntansi.

Dalam proses penyusunan proposal usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Budi Zulfachri, S.S.i.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II..
7. Terima Kasih untuk Papa dan Mama tercinta yang telah memotivasi, mensupport dan memberikan pendidikan terbaik untuk anak kesayangannya.

8. Terima kasih Abang Ahmad Dhani S.i, Kakak Ipar Ari Wulandari S.pd, dan Adik Akmal Syawalda yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
9. Terima kasih Kepada Seluruh Keluarga Abbas Saleh Family dan Keluarga Bellakan Family yang selalu memberikan support dan semangat.
10. Terima kasih Rekan Kerja PT. Citilink Indonesia Tanjungpinang dan PT. Gapura Angkasa Tanjungpinang.
11. Terima Kasih kepada Rendi Dharmawan, Rivo Galu teman main dan berkesah dari awal semester hingga sekarang.
12. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Sore 1 Angkatan 2017.
13. Ririn Oktavianti Vironika yang telah memberikan support, dorongan serta motivasi bagi penulis.
14. Teman-teman dan sahabat berbagai pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih

Tanjungpinang, 15 Agustus 2022



Agung Setiawan
NIM 17622200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Teori	8
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	8
2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i>	11
2.1.3 <i>Corporate Culture</i>	13
2.1.3.1 <i>Pengertian Corporate Culture</i>	13
2.1.3.2 <i>Fungsi Corporate Culture</i>	14

2.1.4	<i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.4.1	Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.4.2	Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	18
2.1.4.3	Unsur-unsur <i>Good Corporate Governance</i>	19
2.1.4.4	Lingkup <i>Good Corporate Governance</i>	20
2.1.5	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.1.6	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Di Indonesia ...	24
2.1.6.1	Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.6.2	Karakteristik Umum Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia	28
2.1.6.3	Desain Struktur <i>Good Corporate Governance</i> ..	30
2.1.6.4	Penyebab <i>Good Corporate Governance</i> Belum Berjalan Secara Optimal di Indonesia	31
2.2	Kerangka Pemikiran	34
2.3	Penelitian Terdahulu	34

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Jenis Data	38
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.4	Teknik Analisis Data	40
3.5	Jadwal Penelitian	43

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1	Data Penelitian.....	44
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
4.2	Hasil Penelitian.....	58
4.3	Pembahasan	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	72
-----	-----------------	----

5.2 Saran	73
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1.	Struktur GC di Indonesia (Dual Board System).....	31
2.	Kerangka Pemikiran.....	22
3.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	41
4.	Struktur Organisasi Bagian Finance & Human Resources.....	48

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Tabel	Halaman
1.	Jadwal Penelitian.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Hasil Wawancara
Lampiran 2	: Foto Bersama Narasumber
Lampiran 3	: Surat Permohonan Izin Permintaan Data
Lampiran 4	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 5	: Persentasi Plagiat
Lampiran 6	: Pedoman Pemenuhan Indikator/ Parameter Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Coporate Governance</i>) di PT Angkasa Pura II Tanjungpinang
Lampiran 7	: Laporan Keuangan yang berkaitan dengan <i>Good Corporate Governance</i>
Lampiran 8	: Website Resmi PT. Angkasa Pura II Tanjungpinang
Lampiran 9	: Daftar Perusahaan terbaik yang telah melakukakan <i>Good Corporate Governance</i> menurut OJK

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT ANGKASA PURA II TANJUNGPINANG

Agung Setiawan. 17622200. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

zagung354@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. Pada prinsip *Good Corporate Governance* di dalamnya terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Guna mewujudkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan peneliti kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka ditunjang dengan data-data sekunder yang di peroleh dari website resmi PT Angkasa Pura II. Objek pada penelitian ini adalah PT Angkasa Pura II Tanjungpinang

Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif, dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap pengumpulan informasi dengan menggunakan teknik wawancara, dari hasil wawancara tersebut peneliti menjelaskan dan menguraikan, tahap selanjutnya peneliti memberikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Angkasa Pura II Tanjungpinang telah berjalan secara optimal. *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran telah dipenuhi PT Angkasa Pura II Tanjungpinang melalui penerapan di lingkungan kerja.

Kata Kunci : Good Corporate Governance

Dosen Pembimbing 1 : Hendy Satria, S. E., M. Ak

Dosen Pembimbing 2 : Budi Zulfachri, S.S.i., M.Si

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN PT ANGKASA PURA II TANJUNGPINANG

Agung Setiawan. 17622200. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.

zagung354@gmail.com

The purpose of this study was to determine how the implementation of Good Corporate Governance at PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. The principles of Good Corporate Governance include the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality.

In order to realize the research objectives that have been described, this study uses qualitative researchers with a descriptive qualitative approach. Data collection methods used are interviews, observation, documentation and literature study supported by secondary data obtained from the official website of PT Angkasa Pura II. The object of this research is PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

The technical analysis of the data used is qualitative analysis using interactive model data analysis techniques, in this study using the stages of collecting information using interview techniques, from the results of the interviews the researchers explain and describe, the next stage the researchers provide conclusions. The results of the study can be concluded that the implementation of Good Corporate Governance at PT Angkasa Pura II Tanjungpinang has been running optimally. Good Corporate Governance which consists of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, equality and fairness has been fulfilled by PT Angkasa Pura II Tanjungpinang through implementation in the work environment.

Keyword : Good Corporate Governance

Dosen Pembimbing 1 : Hendy Satria, S. E., M. Ak

Dosen Pembimbing 2 : Budi Zulfachri, S.S.i., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good Corporate Governance merupakan sebuah pedoman yang digunakan sebagai perantara antara perusahaan dengan para pemegang saham. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan kewajaran.

Good Corporate Governance masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 1997 pada saat krisis ekonomi melanda. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki *corporate culture* sebagai inti dari *corporate governance*. Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat belum dikelola dengan benar dan belum menjalankan governansi (Hamdani, 2016).

Lahirnya *Good Corporate Governance* sebagai bentuk kepatuhan terhadap berbagai peraturan mensyaratkan penerapan *Good Corporate Governance* dan sebagai manifestasi adanya kesadaran dari pemegang saham dan manajemen tentang perlunya penerapan *Good Corporate Governance* dalam memenuhi tuntutan bisnis agar tetap tumbuh dan berkembang dalam iklim persaingan yang semakin kompetitif (Hamdani, 2016).

PT Angkasa Pura II (Persero) Tanjungpinang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Berdirinya Angkasa Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan ini telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya.

Untuk dapat bertahan dan memenuhi tuntutan bisnis, banyak perusahaan saat ini yang menerapkan *Good Corporate Governance* termasuk PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. Perusahaan tidak hanya memastikan proses pengelolaan manajemen dapat berjalan dengan efisien, namun juga harus memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik menggunakan instrument *Good Corporate Governance*. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan sebagai bentuk perhatian masalah tata kelola PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

Menurut Sanjaya (2019), prinsip *Good Corporate Governance* sudah lama diterapkan dalam dunia bisnis dikarenakan sistem pengendalian internal perusahaan ini memiliki tujuan utama mengelola risiko untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan cara mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi *stakeholder* dalam jangka panjang sehingga perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik. *Good Corporate Governance* memiliki 5 prinsip yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan kesetaraan. Prinsip ini memiliki nilai universal yang menjadi pedoman bagi setiap kalangan bisnis baik yang dalam skala kecil maupun skala besar (Effendi, 2016).

Good Corporate Governance sangat penting diterapkan disetiap perusahaan yang ada di Indonesia termasuk PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. Hal tersebut dikarenakan dapat menunjang pertumbuhan perusahaan, mendorong terciptanya persaingan sehat dan menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Namun, penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan Indonesia masih belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan.

Dewan Komisioner OJK, (Hadad, 2015) menjelaskan bahwa ketika terdapat penghargaan yang diberikan kepada 50 perusahaan di tingkat ASEAN dalam hal penerapan *Good Corporate Governance*, hanya ada dua perusahaan yang mendapat penghargaan tersebut berasal dari Indonesia. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan perbankan. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan di Indonesia akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* serta kurang optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* tersebut.

Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan tujuan adanya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban pimpinan, dan perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban serta menerima hak-hak karyawan. Selain itu adanya penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan tujuan melibatkan seluruh karyawan dalam pengembangan perusahaan (Vebbiantri, 2012).

Dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tentu tidak semudah yang dibayangkan. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa krisis ekonomi politik pada tahun 1997 diberbagai negara Asia termasuk Indonesia terjadi salah satunya akibat dari lemahnya pelaksanaan *Corporate Governance*. Hal tersebut sejalan dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1999 adalah masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten (Cahyowati, 2019) .

Hal lain yang menyebabkan kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* adalah kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan, belum adanya budaya yang mendukung asas-asas *Good Corporate Governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal yang dimiliki.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Andypratama & Mustamu, 2013) yang berjudul Penerapan Prinsi-prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan. Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek penelitian. Selain itu, peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan masih belum ada peneliti yang meneliti *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak. Kegunaan-kegunaan tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis untuk melatih diri dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Kegunaan Praktis/Empiris

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan bekal pengalaman dan penambahan wawasan dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian terkhususnya *Good Corporate Governance*.

b. Bagi PT Angkasa Pura II Tanjungpinang

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran, masukan, dan penambahan wawasan dalam pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum PT Angkasa Pura II Tanjungpinang, penyajian data, analisis hasil penelitian serta pembahasan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V menjelaskan kesimpulan dari analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran terkait objek penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang menjelaskan hubungan agensi yang muncul pada saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang (*agent*) untuk memberikan suatu jasa yang kemudian wewenang tersebut diutuskan kepada *agent* tersebut untuk diambil keputusan.

Ilmu pengetahuan telah mengubah peradaban sebuah teori klasik menjadi teori manajemen modern. Kontribusi ilmu manajemen modern, menjadi babak baru lahirnya teori agensi. Teori ini pertama kali diungkapkan oleh Janssen and Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*) (Kathleem. M Eisenhardt, 1989).

Menurut (Ujiyantho & Pramuka, 2007) dalam (Hamdani, 2016), perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*. Sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada manager (*manajer*) untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Dimungkinkan pengelola tidak bertindak atas kepemilikan pemilik, karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict interest*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham dan manager (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang. Dengan adanya *Good Corporate Governance*, tentunya dapat menjadi alat untuk memotivasi manajer agar mampu memaksimalkan nilai pemegang saham (Berle & Means, 1932).

Menurut (Hartono & Nugrahanti, 2014), mekanisme *Good Corporate Governance* berfungsi sebagai alat untuk mendisiplinkan pengelola agar mentaati kontrak yang telah disepakati, sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance* ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Akibat adanya hubungan antara prinsipal dan agen ini, pihak prinsipal harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan *agency cost*. *Agency cost* akan muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. (Jensen & Meckling, 1976) juga mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari:

1. *The monitoring expenditures by the principal* merupakan biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pihak prinsipal untuk mengawasi perilaku dan

tindakan pihak agen.

2. *The bonding expenditures by the agent* merupakan biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak prinsipal untuk menjamin bahwa pihak agen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan prinsipal.
3. *The residual loss* merupakan biaya penurunan kemakmuran setara nilai mata uang yang dialami oleh pihak prinsipal akibat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Menurut Eisenhardt (1989), terdapat dua aspek masalah akibat dari masalah keagenan (*agency problem*), yaitu sebagai berikut:

1. *Adverse selection* adalah kondisi dimana para pemegang saham tidak mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh manajemen didasarkan atas informasi yang diperoleh pemegang saham atau telah terjadi kelalaian tugas seperti manajemen tidak menyampaikan informasi tersebut ke pemegang saham.
2. *Moral Hazard* adalah kondisi dimana manajemen tidak melaporkan kepada para pemegang saham atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan manajemen yang berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan. Permasalahan ini dapat terjadi ketika manajemen tidak melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam kontrak kerja.

Menurut Eisenhardt (1989), ada dua pilihan bagi prinsipal untuk mengurangi masalah keagenan (*agency problem*) yang dapat menghalangi perilaku oportunistik agen, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan struktur *corporate governance* yang mampu mengawasi dan menilai perilaku agen yang sesungguhnya. Struktur ini meliputi prosedur

pelaporan dan *board of directors*. Tanggung jawab dewan direksi termasuk menetapkan tujuan strategis perusahaan, memberikan kepemimpinan untuk menerapkannya, mengawasi pengelolaan bisnis dan melaporkan kepada pemilik modal atas layanan mereka. *Corporate governance* ini kemudian dapat melindungi kepentingan pihak prinsipal yang sering dirugikan akibat tindakan menyimpang agen.

2. Menciptakan struktur *corporate governance* dimana kontrak yang berdasarkan pada *outcome* perilaku agen. Misalnya, pembayaran kompensasi insentif kinerja yang tinggi, sehingga agen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

2.1.2 Stakeholder Theory

Menurut (Freeman, 1984), istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *stanford research institute* (SRI) pada tahun 1963. *Stakeholder* didefinisikan sebagai “*any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization’s objective*”. Bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi.

Menurut (Terzaghi, 2012), tanggung jawab perusahaan yang semula fokus pada indikator ekonomi (*economics focused*) dalam laporan keuangan, saat ini telah bergeser dan lebih memperhitungkan fakto-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan, sangat tergantung pada dukungan *stakeholder*.

Makin *powerful* dukungan *stakeholder*, makin besar kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Gray et al., 1995).

Model hubungan stakeholder yang digambarkan oleh (Donalson & Preston, 1995), membaginya kedalam dua model yaitu model *input-output* dan model stakeholder. Model *input-output* dan model *stakeholders* menganggap bahwa pemasok, investor, dan karyawan sebagai input yang kemudian mengalami proses transformasi menjadi sebuah output yang akan didistribusikan kepada pelanggan.

Menurut (Hamdani, 2016), *corporate governance* mengarahkan pengelolaan perusahaan untuk pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang. Pencapaian keuntungan tersebut merupakan wujud pemenuhan pemegang saham (*stakeholder*) dan tidak dapat melepaskan dari upaya pencapaian *sustainability* yang merupakan wujud pemenuhan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Menurut (Utama, 2019), secara umum *stakeholder* dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Berikut ini adalah klasifikasi *stakeholder* tersebut:

1. *Stakeholder* Utama (Primer)

Stakeholder primer berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

2. *Stakeholder* Pendukung (Sekunder)

Stakeholder sekunder adalah pihak yang berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun *stakeholder* sekunder punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi *stakeholder* utama dan keputusan legal pemerintah.

2.1.3 *Corporate Culture*

2.1.3.1 Pengertian *Corporate Culture*

Menurut Peter F. Drucker dalam (Tika, 2014) *Corporate Culture* atau sering disebut dengan budaya organisasi didefinisikan sebagai inti penyelesaian permasalahan eksternal maupun internal yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terus menerus oleh suatu kelompok dan kemudian diwariskan kepada anggota-anggota baru sebagai prosedur yang tepat dalam memahami, memikirkan, serta merasakan masalah tertentu.

Menurut (Sudaryono, 2017), budaya organisasi diartikan sebagai tata nilai yang disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi yang sifatnya dinamis sehingga mampu meningkatkan produktivitas organisasi. Dinamika dalam budaya organisasi tidak selalu berubah-ubah, hal tersebut dikarenakan jika perusahaan memiliki sesuatu yang penting tetap harus dipertahankan.

Menurut (Samsuddin, 2018), budaya organisasi adalah sistem nilai yang diikuti bersama seluruh karyawan perusahaan. Sistem nilai tersebut nantinya akan dicari karakteristik khas suatu organisasi yang akan membuat perbedaan antara organisasi satu dengan lainnya. Karyawan perusahaan yang mampu memahami

karakteristik khas tersebut akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dalam budaya organisasi tersebut.

2.1.3.2 Fungsi *Corporate Culture*

Menurut (Panbundu, 2012), budaya organisasi dalam suatu perusahaan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Budaya organisasi menjadi pembeda suatu organisasi terhadap lingkungan kerja organisasi dengan kelompok lainnya. Budaya organisasi menciptakan identitas yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
2. Sebagai perekat karyawan dimana budaya organisasi akan membentuk *Sense of Belonging* dan rasa kesetiaan terhadap sesama karyawan. Pemahaman yang baik akan kebudayaan organisasi ini akan membuat karyawan lebih dekat satu sama lain karena memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama untuk dicapai.
3. Budaya organisasi juga berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan sistem sosial dalam lingkungan kerja yang positif dan kondusif sehingga konflik ataupun perubahan dapat diatasi secara efektif.
4. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang mengendalikan dan mengarahkan karyawan kearah yang sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan sehingga hasilnya akan efektif dan efisien.
5. Sebagai alat pemersatu sub-budaya dalam organisasi dan perbedaan latar belakang budaya karyawan.
6. Budaya organisasi akan membentuk perilaku karyawan sehingga karyawan mampu memahami cara untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat bekerja lebih terarah.

7. Budaya organisasi dijadikan sebagai sarana untuk memecahkan masalah perusahaan seperti beradaptasi dengan lingkungan.
8. Budaya organisasi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pemasaran, segmentasi pasar, dan penentuan *positioning*.
9. Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota perusahaan atau organisasi.
10. Organisasi tidak selalu memberikan unsur positif bagi perusahaan karena menghambat inovasi.

Menurut Greenberg dan Baron dalam (Priansa, 2018), *corporate culture* memiliki sejumlah fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemberi rasa identitas.
2. Membangkitkan komitmen pada misi organisasi.
3. Memperjelas dan memperkuat standar perilaku.

Sementara menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki dalam (Karlina et al., 2018) fungsi budaya organisasi adalah sebagai berikut:

1. Memberi anggota identitas organisasional.
2. Memfasilitasi komitmen kolektif.
3. Meningkatkan stabilitas sistem sosial.
4. Membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari lingkungannya.

2.1.4 *Good Corporate Governance*

2.1.4.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan kewajaran.

Menurut (Agoes, 2011), *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, Peran Direksi, Pemegang Saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan dapat dikatakan baik apabila memiliki proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Sementara menurut (Todorovic, 2013), *Good Corporate Governance* diartikan sebagai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang tepat dengan tujuan meningkatkan keuntungan. Kinerja perusahaan juga bisa menjadi lebih rendah dari kinerja yang seharusnya apabila ada ketidaksesuaian sasaran yang ditetapkan para pemilik dengan sasaran yang menjadi kepentingan para agen atau manajer.

Menurut (Ulistianingsih, 2015), *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu mekanisme yang mengatur hubungan antara pemilik, pengelola, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam mengendalikan perusahaan sebagai upaya penciptaan nilai tambah. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan.

Menurut Risdiyani (2015), konsep *Good Corporate Governance* digunakan agar tercapainya hubungan dan kerjasama yang kondusif antara pihak-pihak dalam perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Dengan begitu, pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, kewajaran, kemandirian dan pertanggungjawaban. Implementasi *Good Corporate Governance* diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. *Monitoring Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh dewan komisaris diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang mungkin terjadi sehingga pelaporan keuangan dapat dilaksanakan dengan lebih transparan.

Good Corporate Governance menurut Bank Dunia dalam (Hamdani, 2016) didefinisikan sebagai aturan, standar, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan kreditur. Tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Menurut (Mambela, 2020) *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu struktur yang mengatur bentuk relasi yang harmonis tentang peran antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, dan para stakeholder lainnya dalam pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang mampu melakukan pembatasan munculnya dua peluang yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.

2.1.4.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat yang diperoleh apabila suatu perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* menurut (Mambela, 2020) adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan Risiko

Dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat meminimalisir praktik-praktik yang menimbulkan masalah.

2. Meningkatkan Nilai Saham

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah indikator perusahaan yang telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan dengan meningkatnya kepercayaan akan menjadikan nilai saham banyak diminati di bursa efek sehingga berdampak positif bagi kenaikan saham.

3. Menjamin Kepatuhan

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur operasi ditunjukkan untuk mengarahkan perusahaan kepada kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Memiliki Daya Tahan

Dengan mengimplementasi *Good Corporate Governance*, perusahaan akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia sekitarnya. Keuntungan yang diambil perusahaan apabila menerapkan konsep *Good Corporate Governance* menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalkan *agency cost*.
- b. Meminimalkan *cost capital*.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
- d. Mengangkat citra perusahaan.

5. Memicu Kinerja

Melalui mekanisme *supervise* kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya akan memicu jajaran komisaris dan direksi dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

6. Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Good Corporate Governance mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh *stakeholders* dan diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan-laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan akuntabilitas publik.

2.1.4.3 Unsur-unsur *Good Corporate Governance*

Menurut (Sutedi, 2011), unsur-unsur *Good Corporate Governance* terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan

Unsur-unsur internal perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham;
- b. Direksi;

- c. Dewan Komesaris;
- d. Manajer;
- e. Karyawan;
- f. Sistem Remunerasi Berdasarkan Kinerja; dan
- g. Komite Audit.

2. *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan

Langkah-langkah yang berasal dari luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kecukupan Undang-undang dan perangkat hukum;
- b. Investor;
- c. Institut penyedia informasi;
- d. Akuntan publik;
- e. Pemberi pinjaman; dan
- f. Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2.1.4.4 *Lingkup Good Corporate Governance*

Menurut OCED (*The Organization for Economic and Development*) dalam (Mambela, 2020) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham terhadap pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak-hal dasar pemegang saham, yaitu:

- a. Hak mendapatkan jaminan keamanan dan metode pendaftaran kepemilikan.
 - b. Hak untuk dapat memindahkan kepemilikan saham.
 - c. Hak mendapatkan data yang wajar serta akurat tentang perusahaan secara teratur.
 - d. Hak untuk ikut memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komesaris dan direksi.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembagian laba perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham
- Kerangka yang disusun pada *Good Corporate Governance* harus dapat memberi jaminan perlakuan yang sama terhadap seluruh *stakeholder*, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktek perdagangan berdasarkan informasi orang dalam dan transaksi dengan diri sendiri. Selain itu prinsip *Good Corporate Governance* mengharuskan anggota dewan komisaris untuk transparan ketika mendapat transaksi yang didalamnya berisi benturan dan problem kepentingan.
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholder*)
- Kerangka yang dibangun dalam *Good Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan pendorong kerjasama yang aktif dari perusahaan serta *stakeholder* untuk membuat lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha.

4. Pengungkapan dan Transparansi (*disclosure and transparency*)

Kerangka yang dibuat bagi *Good Corporate Governance* harus memberikan jaminan adanya pengungkapan tepat waktu dan akurat disetiap masalah yang berhubungan dengan entitas. Pelaporan harus mencakup data tentang finansial, kinerja, kepunyaan serta pengelolaan suatu entitas. Informasi yang ditanyakan wajib disusun, diaudit, serta disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga memohon agar auditor eksternal (KAP) dalam melangsungkan audit bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggungjawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibility of the board*)

Struktur yang dibuat oleh *Good Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komesaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Pedoman ini juga membuat kewenangan dan kewajiban bersifat profesional oleh dewan komisaris kepada *stakeholder*.

2.1.5 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Hamdani (2016), Indonesia melalui Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) tahun 2006 mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang menetapkan 5 prinsip, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi mengandung unsur oengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh

pemangku kepentingan dan masyarakat. Prinsip transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan agar objektivitas dalam menjalankan bisnis dapat terjaga. Selain itu, perusahaan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksudkan adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan..

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip dasar responsibility adalah perusahaan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat lingkungan agar kesinambungan usaha dapat terpelihara dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam hal ini, tanggung jawab mencakup adanya deksripsi yang jelas tentang peranan dari

semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan yaitu harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Hal ini dapat melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar kewajaran dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor dan masyarakat luas.

2.1.6 Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

2.1.6.1 Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Thomas S. Khaitu dalam (Hamdani, 2016) penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan memerlukan tahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan serta tingkat persiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya

perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *Good Corporate Governance* menggunakan pentahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yaitu sebagai berikut:

a. *Awareness building*

Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

b. *Good Corporate Governance assessment*

Good Corporate Governance Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan *Good Corporate Governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan *Good Corporate Governance* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Good Corporate Governance* secara efektif. Dengan kata lain, *Good Corporate Governance assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkan.

c. *Good Corporate Governance manual building.*

Good Corporate Governance manual building adalah langkah berikut setelah *Good Corporate Governance assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan supaya identifikasi prioritas penerapannya. Penyusunan *manual* atau pedoman implementasi *Good Corporate Governance* dapat disusun. Penyusunan *manual* dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara *manual* untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup sebagai sapek seperti:

- 1) Kebijakan *Good Corporate Governance* perusahaan
- 2) Pedoman *Good Corporate Governance* bagi organ-organ perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) *Audit committee charter*
- 5) Kebijakan *disclosure* dan tranparansi
- 6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- 7) *Readmap* implementasi

2. Tahap implementasi

Setelah perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implemtasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

- a. Sosialisasi, diperlakukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance*. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang

dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *Good Corporate Governance* champion di perusahaan.

- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *Good Corporate Governance* yang ada, berdasarkan *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pada upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi *Good Corporate Governance*.
- c. Internalisasi, mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan dan berbagai peraturan perusahaan. Upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* bukan sekedar dipermukaan atau sekadar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik *Good Corporate Governance* yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang memberikan jasa audit, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk

assessment, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.1.6.2 Karakteristik Umum Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Menurut Lukviarman dalam (Hamdani, 2016), penerapan *Good Corporate Governance* di masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk *Good Corporate Governance* di Indonesia yaitu :

1. Kepemilikan perusahaan terkonsentrasi pada individu atau keluarga sehingga pihak ini mempunyai pengaruh kuat untuk menentukan arah perusahaan. Akibatnya problem keagenan (*the agency problem*) lebih terarah pada benturan kepentingan antara pemilik saham minoritas selali berada pada posisi yang lemah.
2. Kepemilikan saham dengan penguasaan mayoritas oleh keluarga, diikuti dengan ikut campurnya anggota keluarga atau orang dekat kepercayaannya untuk menduduki posisi direksi atau komisaris, yang seharusnya menjadi pengawas manajemen, menjadi tidak kapabel serta tidak independen di dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepemilikan saham keluarga juga diikuti dengan berkembangnya kelompok bisnis keluarga berpola konglomerat (*conglomeration*) dengan bidang usaha

yang sangat terdiversifikasi. Berbagai perusahaan yang menjadi anggota kelompok bisnis tersebut dikuasai melalui “penguasaan bertingkat dengan pola piramida” (*pyramidal ownership structure*).

4. Perusahaan publik di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat hutang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk mata uang asing yang tidak dilindung-nilaikan (*un-hedge*), sehingga sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian. Pada beberapa kasus, dana pinjaman yang diperoleh dialokasikan pada kegiatan investasi lainnya yang tidak produktif, sehingga menurunkan nilai perusahaan.
5. Pasar modal relatif kecil dan tidak “likuid” sehingga tidak mampu secara efektif berperan sebagai mekanisme kontrol eksternal dalam upaya penerapan prinsip CG. Untuk mengatasinya, kelompok bisnis (konglomerat) menjadikan organisasi ini sebagai *internal capital market* dalam memfasilitasi pemindahan dana dari berbagai perusahaan dalam kelompok bisnis mereka.
6. Kombinasi antara relatif kecilnya pasar modal Indonesia dengan sedikitnya proporsi kepemilikan perusahaan (dalam bentuk) saham yang dijual kepada publik, membuat pemilik mayoritas berada pada posisi yang sangat kuat. Terutama dengan tidak adanya mekanisme kontrol eksternal lainnya, seperti merger dan akuisisi, untuk ikut mendisiplinkan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip CG yang sehat.
7. Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya di dalam menjaga berjalannya sistem secara benar, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kondisi ini semakin memperlemah pemilik minoritas namun, sebaliknya, akan

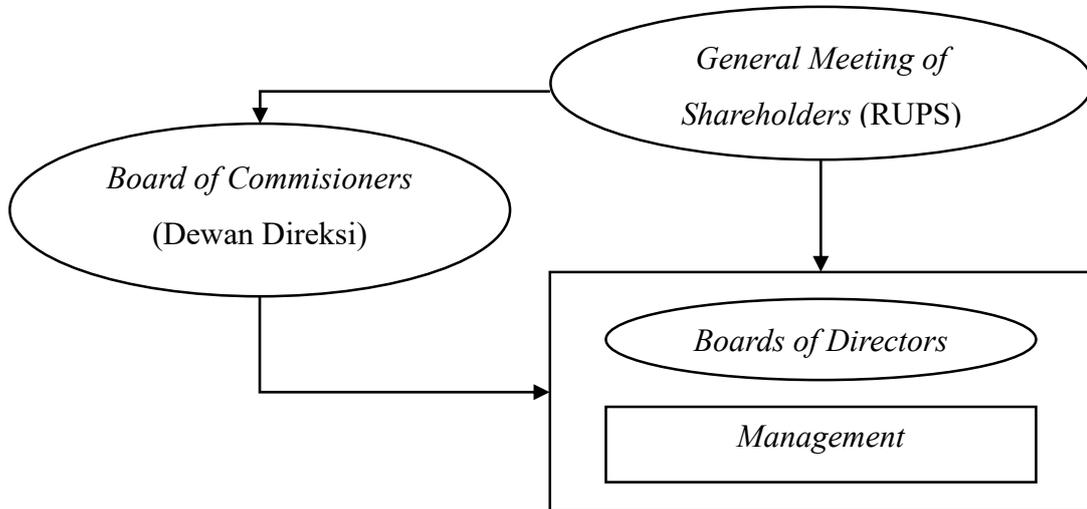
memperkuat posisi pemilik saham mayoritas untuk mengeksploitasi sumber daya perusahaan untuk kepentingan, namun merugikan kepentingan pihak lainnya (terutama pemegang saham minoritas).

8. Belum terdapat upaya perbaikan menyeluruh yang mencakup pembenahan seluruh komponen sistem CG guna mendukung terlaksananya penerapan mekanisme kontrol untuk menjamin berjalannya sistem ini secara seimbang dan berkesinambungan.

2.1.6.3 Desain Struktur *Good Corporate Governance*

Menurut (Hamdani, 2016), di Indonesia, struktur CG diatur dalam UU PT no 40 tahun 2007. Secara umum, perusahaan-perusahaan di Indonesia struktur CG berbasis *two board system*. Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahu direksi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU PT No 40 tahun 2007 bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Pasal 94 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Selain itu, kedudukan anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Struktur CG yang menempatkan dewan komisaris dan dewan direksi sejajar berdampak pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena dewan direksi beranggapan sebagai mitra kerja. Berikut adalah gambar struktur *corporate governance* untuk perusahaan-perusahaan Indonesia dengan mengacu pada UU PT No 40 Tahun 2007. Berikut adalah struktur CG di Indonesia (*Dual Board System*) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur GC di Indonesia (Dual Board System)



Sumber: (Hamdani, 2016)

2.1.6.4 Penyebab *Good Corporate Governance* Belum Berjalan Secara Optimal di Indonesia

Menurut Supriyanto dan Susanty dalam (Hamdani, 2016), terdapat beberapa persoalan yang meliputi praktik *Good Corporate Governance* di Indonesia diantaranya:

1. Belum profesionalnya pengelolaan perusahaan (ADB, 1998). Konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta belum berfungsinya dewan komisaris.
2. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol meningkatkan ketidak simetrisan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas akan menyulitkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

3. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan lemahnya proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas.
4. *Score* keterbukaan yang rendah.

Menurut (Wibowo, 2010), kendala penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dibagi kedalam tiga bagian, yaitu kendala internal, kendala eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan.

1. Kendala internal

Kendala internal meliputi: kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya tingkat pemahaman dari pimpinan dan karyawan perusahaan tentang prinsip-prinsip *good corporate governance*, kurangnya panutan atau teladan yang diberikan oleh pimpinan, belum adanya budaya perusahaan yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance*, serta belum efektifnya sistem pengendalian internal.

2. Kendala external

Kendala eksternal dalam pelaksanaan *corporate governance* terkait dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum (*law-enforcement*) secara implisit ketentuan-ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* telah ada tersebar dalam UUPT, Undang-undang dan peraturan perbangan, Undang-undang pasar Modal dan lainnya. Namun penagakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia Bapepam, BPPN, Kementrian Keuangan, BUMN, bahkan pengadilan sangat lemah.

3. Kendala berasal dari struktur kepemilikan.

Berdasarkan persentasi kepemilikan dalam saham, kepemilikan terhadap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan yang terkonsentrasi akan didominasi oleh seseorang atau sekelompok orang saja (40,00% atau lebih). Kepemilikan yang menyebar terjadi pada saat suatu perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang banyak dengan jumlah saham yang kecil-kecil (satu pemegang saham hanya memiliki saham sebesar 5% atau kurang).

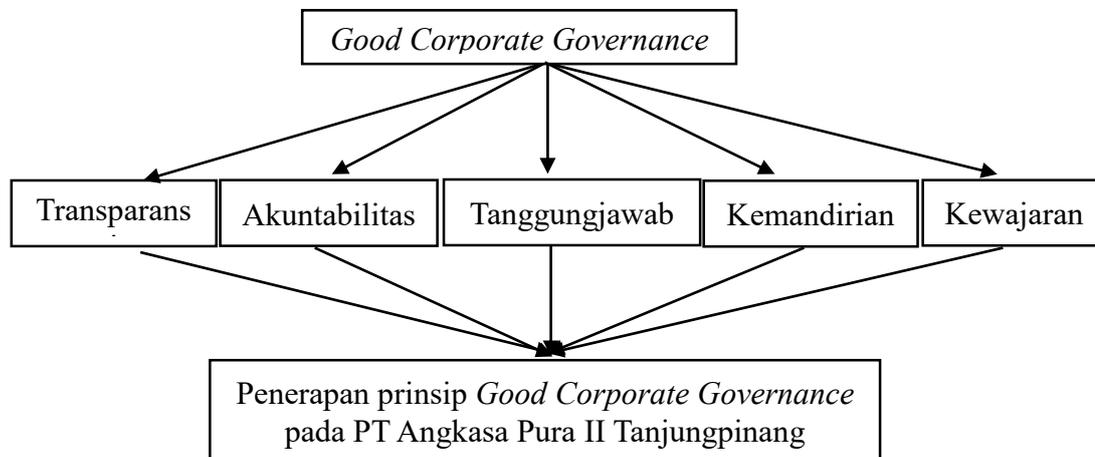
Dengan harapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* kedepan dapat berjalan secara efektif dan memiliki *score/rating Good Corporate Governance* yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menurut (Hamdani, 2016), untuk memenuhi harapan tersebut maka perusahaan-perusahaan di Indonesia wajib melakukan:

- a. Pengelolaan perusahaan secara profesional dan tidak memiliki hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan serta dewan komisaris.
- b. Terciptanya hubungan yang simetris sehingga pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
- c. Melakukan proteksi hukum bagi pemegang saham minoritas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah kerangka yang mendeskripsikan secara umum permasalahan sebuah penelitian. Untuk dapat menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka dibentuklah sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2021)

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sally Marcelina Djauhari dan Parulian Sihotang dengan judul "*Study of Good Corporate Governance Implementation in Listed State-Owned Enterprises Through A Content Analysis Method of Annual Reports*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauhmana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar. Metode yang digunakan adalah observasi melalui laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil penelitiannya adalah skor perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Djauhari & Sihotang, 2010).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lukas William Andypratama dan Ronny H. Mustamu dengan judul "*Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan*". Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate*

Governance pada suatu perusahaan yaitu distributor makanan. Peneliti menggabungkan dan menganalisa kinerja perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan dan observasi secara langsung di lingkungan perusahaan. Pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapati masih ada bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* yang belum dilaksanakan, yaitu prinsip *accountability* dan *responsibility*. Diharapkan perusahaan bisa melaksanakan prinsip *accountability* dan *responsibility* yang belum terlaksana, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip lainnya (Andypratama & Mustamu, 2013).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daniella Okke Chrisnanda dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga PT Danliris Di Surakarta, Jawa Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran pada bisnis keluarga PT Danliris. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan pengamatan. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. Dalam menganalisis data menggunakan teknik triagulasi sumber yaitu membandingkan data dari hasil wawancara dengan pengamatan yang dilakukan di PT Danrilis. Hasilnya adalah perusahaan tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Chrisnanda, 2014).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Terius Yoel Yohanmar dan Ratih Indriyani dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Sumber Jaya Gemilang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Sumber Jaya Gemilang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan penetapan narasumber menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan PT Sumber Jaya Gemilang belum maksimal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Di perusahaan masih ditemukan beberapa kekurangan, seperti tidak adanya organ perusahaan. *Standart Operasional Procedure* yang belum tersedia disemua bagian perusahaan, karyawan yang belum diikutsertakan dalam program asuransi, serta adanya rangkap tugas dalam perusahaan (Yohanmar & Indriyani, 2016).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Niko Demus Mambela dengan judul “Analisis *Good Corporate Governance* pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Bank Perkreditan Rakyat Sulawesi berdasarkan prinsip keterbukaan, akutabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran BPR Sulawesi Manderi dengan sampel yaitu HRD. Hasil penelitian ini adalah perusahaan telah melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* secara utuh untuk memenuhi harapan *stakeholder*,

mendapatkan legitimasi, dan memenangkan penghargaan tertentu (Mambela, 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang datanya diperoleh dan dihasilkan dalam bentuk deskriptif. Data tersebut dalam bentuk transkripsi wawancara, dokumentasi, rekaman, catatan lapangan, dan lain-lain (Sugiyono, 2014).

Sementara menurut (Riadi, 2016), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang datanya tidak dalam berbentuk angka tetapi dalam bentuk narasi, gambar, artefak, transkrip dan lainnya. Data tersebut dapat diperoleh dari wawancara bersama narasumber, melakukan observasi, menganalisis dokumen, dan diskusi terfokus.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Misbahuddin & Hasan (2013), data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari hasil kegiatan wawancara peneliti bersama karyawan-karyawan yang bersangkutan dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

Sementara menurut Sujarweni (2015), data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumber pertama, data tersebut telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

buku cetak, artikel jurnal, dan berbagai sumber informasi lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2016), pengumpulan data dapat dikatakan berkualitas apabila dilakukan dengan pemilihan cara yang tepat dalam mengumpulkan data. Berikut ini beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2017), wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini juga dipakai apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan mengenai permasalahan penelitian jika jumlah informan tersebut sedikit. Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk menemukan dan memperjelas permasalahan yang akan diteliti bersama karyawan-karyawan dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang. Berikut adalah pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

2. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2017), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil wawancara akan lebih kredibel apabila didukung oleh dokumen-dokumen dan menambahkan informasi terkait penelitian.

4. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2015), studi pustaka diartikan sebagai kegiatan pencarian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, maupun dokumen lainnya yang memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan.

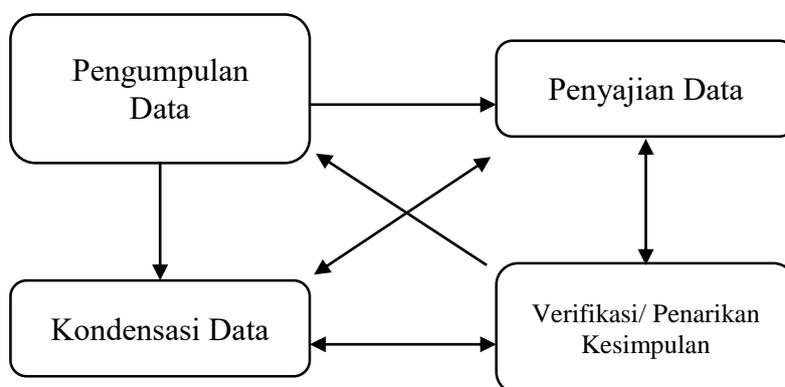
3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif menggunakan sumber deskripsi yang luas berdasarkan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal (Silalahi, 2012).

Menurut (Moleong, 2014), penelitian kualitatif menggunakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati. Sementara Menggambarkan dan menceritakan keadaan yang ada pada objek penelitian, tujuannya untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh objek penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teori dari (Miles et al., 2014). Analisis data tersebut dilakukan dengan komponen-komponen sebagai berikut:

Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: (Miles et al., 2014)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang didapat melalui wawancara dalam penelitian ini. Berikut adalah proses dari kondensasi data yaitu sebagai berikut:

a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak selektif, artinya peneliti harus menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b. *Focusing*

Peneliti harus memfokuskan data dalam bentuk pra analisis. Dalam tahap ini, fokus hanya kepada data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini juga merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data sehingga peneliti hanya membatasi data yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Abstracting*

Usaha membuat rangkuman yang berisikan inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul akan dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecakupan data.

d. *Simplifying dan Transforming*

Peneliti menyederhanakan dan mentransformasikan dalam berbagai cara melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial yang telah dikategorikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2011). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Andypratama, L. W., & Mustamu, R. H. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga: Studi Deskriptif Pada Distributor Makanan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1), 1–11.
- Berle, A., & Means, G. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. Macmillan.
- Cahyowati, M. A. (2019). *Analisis Penerapan Asas-asas Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT Trio Utama, Bantul)*. Universitas Sanata Dharma.
- Chrisnanda, D. O. (2014). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga PT Danliris di Surakarta, Jawa Tengah. *AGORA*, 2(2).
- Djauhari, S. M., & Sihotang, R. P. (2010). Study of Good Corporate Governance Implementation in Listed State-Owned Enterprises Through A Content Analysis Method of Annual Reports. *Journal of Applied Finance and Accounting*, 3(1), 35–46.
- Donalson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *The Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi* (Ed. 2). Salemba Empat.
- Eisenhardt, Kathleem. M. (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review.
- Eisenhardt, Kathleen M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Freeman, R. . (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: 1994. The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. *Business Ethics Quarterly*, 4(4), 409–421.
- Gray, Rob, R. K., & Simon, L. (1995). Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
- Hadad, M. D. (2015). *OJK Berharap Banyak Perusahaan RI Penuhi Kriteria Good Corporate Governance ASEAN*. Kompas.Com. <https://travel.kompas.com/read/2015/11/17/140256826/OJK.Berharap.Banyak.Perusahaan.RI.Penuhi.Kriteria.Good.Corporate.Governance.ASEAN>
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media.

- Hartono, D. ., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 3(2), 191–205.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karlina, E., Martiwi, R., & Suharyadi, D. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah. *Widya Cipta*, 2(1), 83–90.
- Mambela, N. D. (2020). *Analisis Good Corporate Governance Pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sulawesi Mandiri*. Universitas Kristen Indonesia Paulus.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2013). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Panbundu, M. T. (2012). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Bumi Aksara.
- Priansa, D. J. (2018). *Manajemen Organisasi Publik (Mengembangkan Organisasi Modern Berorientasi Publik)*. CV Pustaka Setia.
- Riadi, E. (2016). *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan IBM SPSS)* (Ed.1). CV Andi Offset.
- Risdiyani, F. (2015). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage, Pertumbuhan Perusahaan Dan Financial Distress Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Universitas Negri Semarang*, 1–125.
- Samsuddin, H. (2018). *Kinerja Pegawai: Tinjauan dari Dimensi Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi*. Indomedia Pustaka.
- Sanjaya, M. D. R. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM*. Universitas Sanata Dharma.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.
- Sudaryono. (2017). *Pengantar Manajemen: Teori dan Kasus*. CAPS.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi*. PUSTAKA BARU PRESS.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governace* (Ed. 1). Sinar Grafika.
- Terzaghi, M. T. (2012). Pengaruh Earning Management dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, 2(1), 31–47.
- Tika, M. P. (2014). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. PT Bumi Aksara.
- Todorovic, I. (2013). Impact of Corporate Governance on Performance of Companies. *Montenegrin Journal of Economics*, 9(2), 47–53.
- Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. . (2007). *Mekanisme Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Studi Pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur*.
- Ulistianingsih, A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016). *JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG*, 4, 1–96.
- Utama, I. V. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengendalian Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daer*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Vebbiantri, O. (2012). *Implementasi Good Corporate Governance Ditinjau Dari Persepsi Karyawan Pada PT. Antam DPK*. Universitas Indonesia.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 10(2), 129–138.
- Yohanmar, T. Y., & Indriyani, R. (2016). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Sumber Jaya Gemilang. *AGORA*, 4(2), 222–228.

CURICULUM VITAE



Nama : Agung Setiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 14 Desember 1996
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Email : zagung354@gmail.com
Alamat : Jalan Satria Perumahan Grace Permata
Indah Blok. A2

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar (SD) : SDN 064012 Medan
Sekolah Menenga Pertama (SMP) : SMP Swasta Darussalam Medan
Sekolah Menengah Atas (SMA) : SMA Swasta Panca Budi Medan
Universitas : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang